



Kekalahan Partai Golongan Karya pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2020

Stevan Togi Mandiri Sianturi¹, Fredick Broven Ekayanta^{2*}

^{1,2} Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Submitted : 08 October 2022 Revision : 15 July 2023 Accepted : 24 July 2023

Abstract

This article attempts to explore why the candidate nominated by the Golongan Karya Party lost in Pelalawan District Local Election in 2020. Whereas in the previous elections, the Golongan Karya Party had always won political contestations, both in the legislative and regional head elections in Pelalawan. This article argues that the defeat was caused by the internal conflicts of the Golkar Party, the absence of coalition with another parties, and the figure factor. This argument is built based on a theoretical framework built through the theory of political party factionalization, local election theory, and local elite conflict. This article analyzes empirical data collected from in-depth interviews in the context of the involvement of the Pelalawan Golongan Karya Party in the 2020 regional head elections. The in-depth interviews were conducted in June-July 2022. This article strengthens the theory of political party factionalization which has an impact on the decline in vote percentage and emphasized that the dynamics of direct regional head election in Indonesia are strongly influenced by figures, not political parties.

Keywords: *factionalization, defeat, political party, local election*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa kandidat yang diusung oleh Partai Golongan Karya pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Pelalawan tahun 2020 mengalami kekalahan. Padahal sebelumnya Partai Golongan Karya selalu memenangkan kontestasi politik, baik dalam pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah di Pelalawan. Artikel ini berargumen bahwa kekalahan tersebut disebabkan oleh munculnya konflik internal, tidak adanya koalisi, dan faktor figur. Argumen tersebut dibangun berdasarkan kerangka teori yang dibangun melalui teori faksionalisasi partai politik, teori pilkada, dan konflik elite lokal. Artikel ini menganalisis data empirik yang dikumpulkan dari hasil wawancara mendalam dalam konteks keterlibatan Dewan Perwakilan Daerah II Partai Golongan Karya Pelalawan pada pemilihan kepala daerah tahun 2020. Wawancara mendalam tersebut dilakukan pada bulan Juni-Juli 2022. Artikel ini memperkuat teori faksionalisasi partai politik yang berdampak pada penurunan perolehan suara pada pemilihan umum, serta menegaskan bahwa dinamika pemilihan kepala daerah secara langsung di Indonesia sangat dipengaruhi oleh figur, bukan partai politik.

Kata Kunci: faksionalisasi, kekalahan, partai politik, pemilihan kepala daerah

How to Cite: Sianturi, S.T.M. & Ekayanta, F. (2023). Kekalahan Partai Golongan Karya pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2020, *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, Vol 15 (2): 110 - 120.

*Corresponding author: Fredick Broven Ekayanta

E-mail: frbrov@usu.ac.id

PENDAHULUAN

Di era Reformasi, pemilihan kepala daerah (pilkada) menjadi arena kontestasi politik baru, untuk menentukan aktor-aktor politik yang duduk di lembaga legislatif dan eksekutif di daerah. Dengan demikian, dimungkinkan terjadinya sirkulasi elite secara rutin dan perubahan peta kekuatan politik. Akan tetapi, di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, selama kurang lebih dua dekade Partai Golongan Karya (Golkar) sangat dominan dan melanjutkan dominasinya yang telah terbangun sejak Orde Baru. Menurut Mujani, Liddle, dan Ambardi (2019), kemampuan Golkar untuk mempertahankan diri meskipun ada sentimen anti-Golkar yang kuat di awal era Reformasi, merupakan produk dari pelebagaan yang mapan.

Dominasi Partai Golkar di Kabupaten Pelalawan tergambar dari kemenangannya pada Pemilihan Legislatif (pileg) tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019. Dominasi ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Perolehan Kursi Partai Golkar pada Pileg Pelalawan di Era Reformasi

Tahun	Peringkat	Persentase Suara (%)	Jumlah Kursi
2004	1	16	5/dari total 30 kursi
2009	1	23	7/30
2014	1	31	11/35
2019	1	26	9/35

Sumber: Diolah dari data KPU Pelalawan (2020)

Selain itu, kandidat yang diusung oleh Partai Golkar pun memenangkan pilkada di Pelalawan pada tahun 2006, 2011, dan 2016, sebagaimana yang terlihat di tabel di bawah ini:

Tabel 2. Pemenang Pilkada Langsung di Pelalawan tahun 2006-2016

Tahun	Bupati Terpilih	Persentase Suara	Partai Politik Pengusung
2006	Tengku Azmun Jaafar	58,64%	Golkar
2011	Muhammad Harris	41,38%	Golkar, PAN, PKB, Hanura, dan PDIP
2016	Muhammad Harris	50,57%	Golkar, Gerindra, Nasdem, PAN, PKB, PBB, dan PKS

Sumber: Diolah dari data KPU Pelalawan (2020)

Dominasi Partai Golkar berhenti pada pilkada tahun 2020 saat kandidat

yang diusung kalah. Kekalahan ini cukup mengejutkan mengingat bertahannya dominasi Golkar di era Reformasi di Pelalawan sudah terjadi selama dua dekade. Golkar di Pelalawan juga relatif terinstitusionalisasi dengan baik, yang ditandai dengan jumlah anggota partai sekitar 4 ribu orang dan jaringan partai yang terdapat di semua jenjang mulai dari kecamatan, hingga kelurahan dan desa. Selain itu, Golkar Pelalawan juga memiliki berbagai organisasi sayap yang terafiliasi dengan partai, mulai dari Kosgoro, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong, Sentra Organisasi Karya Indonesia, Angkatan Muda Partai Golkar, Kelompok Perempuan Partai Golkar, Satuan Kerja Ulama, Majelis Dakwah Indonesia, Himpunan Wanita Karya, Al-Hidayah, dan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia.

Berdasarkan latar di atas, artikel ini akan berupaya menjawab pertanyaan: mengapa kandidat yang diusung oleh Partai Golkar pada Pilkada Pelalawan tahun 2020 mengalami kekalahan? Melalui pertanyaan tersebut, artikel ini

bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang dapat menyebabkan berhentinya dominasi partai politik tertentu dalam politik elektoral di tingkat lokal. Sebelum menjawab pertanyaan ini, artikel ini akan menyoroti sejumlah kajian yang menganalisis faktor-faktor kekalahan yang bisa terjadi di pilkada di Indonesia.

Penelitian Abidin dan Sultan (2021) yang menanalisis kekalahan kandidat Partai Golkar pada Pilkada Polewali Mandar tahun 2008 menemukan bahwa tidak adanya koalisi, adanya kandidat petahana yang dianggap memiliki modal politik lebih kuat, faktor kekerabatan dan strategi kampanye politik yang tidak optimal menjadi penyebab kekalahan. Adapun penelitian Pratama dkk. (2016) tentang kekalahan kandidat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Pilkada Kabupaten Klungkung, menemukan bahwa konflik internal partai, isu diskriminasi politik, dan pragmatisme di masyarakat menjadi penyebab kekalahan. Konflik partai juga menjadi penyebab kekalahan kandidat walikota yang diusung oleh Golkar

pada Pilkada Ternate tahun 2015 (Muhammad 2021).

Berdasarkan sejumlah kajian di atas bisa disimpulkan bahwa faktor kekalahan kandidat pada pilkada sangat beragam dan bergantung pada konteks politik yang berlangsung di daerah tersebut. Tetapi faktor yang sering menjadi penyebab adalah konflik internal di partai politik. Artikel ini memiliki asumsi bahwa ada faktor konflik internal, disertai dengan dinamika politik yang terjadi di Pilkada Pelalawan 2020, sehingga menghasilkan perubahan partai politik pemenang. Oleh karena itu artikel ini akan menjawab pertanyaan di atas dengan kerangka teori yang akan dibangun berdasarkan teori faksionalisasi partai politik, pilkada, dan kompetisi intra-partai.

Selama ini, partai politik dipahami sebagai organisasi yang memiliki anggota yang memiliki kesamaan visi dan tujuan, serta memiliki fungsi rekrutmen dan pembentukan elite, artikulasi dan agregasi kepentingan, sosialisasi dan mobilisasi, serta mengorganisasi pemerintah (Heywood 2002). Padahal, tiap anggota tersebut pun memiliki

kepentingan individu. Oleh karenanya, kompetisi dalam partai pun sesuatu yang lumrah terjadi. Dalam studi-studi ilmu politik, kondisi tersebut kemudian dirumuskan dalam teori faksionalisasi. Teori ini memiliki asumsi bahwa faksi itu melekat dalam partai karena ada keragaman pandangan dan kelompok politikus yang bergabung dalam satu partai tersebut karena diikat oleh kesamaan tujuan ideologis tertentu (Haris 2018).

Pemicu terjadinya faksionalisasi dalam sebuah partai adalah perbedaan kepentingan, pandangan dan posisi politik. Pada gilirannya, faksionalisasi ini dapat menimbulkan konflik internal. Konflik internal partai dapat mempengaruhi kinerja elektoral, yang ditandai dengan adanya perpindahan suara kader (*split of cadre votes*). Kader yang mulanya dapat memberi sumbangan pada kinerja elektoral, tetapi karena konflik, dapat membuat sumbangan tersebut berpindah pada kandidat yang lainnya (Nurhasim 2018).

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang

didefinisikan Creswell (2012) sebagai penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara mendalam terhadap lima informan yang dipilih secara purposif, yakni Ketua dan Sekretaris DPD II Partai Golkar Pelalawan, kandidat Pilkada Pelalawan 2020, Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Riau, dan Wakil Ketua Pemenangan Pemilu Partai Golkar Pelalawan. Informan-informan tersebut dipilih berdasarkan pengalaman mereka yang berinteraksi dan mengetahui mengenai masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Sementara itu dalam menganalisis data, artikel ini menggunakan langkah-langkah transkrip hasil wawancara, mereduksi data, dan menginterpretasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Artikel ini berargumen bahwa ada tiga faktor yang menjadi penyebab kalahnya kandidat yang diusung oleh Partai Golkar pada Pilkada Pelalawan 2020. Tiga faktor tersebut adalah konflik internal di Partai Golkar

Pelalawan, tidak adanya koalisi dengan partai lain, serta faktor figur.

Konflik Partai Golkar Pelalawan dalam konteks pilkada tahun 2020 tak bisa dilepaskan dari proses kandidasi yang dilakukan untuk menentukan siapa yang akan diusung oleh partai. Dalam proses kandidasi, Partai Golkar Pelalawan melakukan dua tahap, yaitu melakukan wawancara terhadap bakal kandidat dan kemudian melakukan survei. Kandidat yang diusung adalah kandidat yang memiliki kompetensi dan kemampuan, serta memiliki hasil survei yang baik (wawancara dengan Adi Sukemi). Hal ini juga dikonfirmasi oleh Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar Riau yang menyebutkan bahwa proses kandidasi dimulai dengan usulan dari DPD II Kabupaten/Kota, diteruskan ke DPD I Provinsi, dan diteruskan ke DPP di tingkat pusat (wawancara dengan Ikhsan).

Pada Pilkada Pelalawan 2020, ada enam bakal kandidat yang diusulkan melalui DPD II Golkar Pelalawan, salah satunya adalah Adi Sukemi yang menjabat sebagai Ketua Golkar Pelalawan, yang kemudian mendapatkan tiket pencalonan dari

Partai Golkar. Menurut Adi Sukemi, keterpilihannya adalah berdasarkan pengalamannya dalam memimpin Golkar Pelalawan. Selain Adi Sukemi, seorang kader Golkar lain yaitu Nasruddin juga mengajukan diri untuk mengikuti kontestasi. Tetapi pada prosesnya tidak ada titik temu, karena Nasarudin tetap ingin mengikuti pilkada sebagai kandidat. Dinamika kandidasi dari Partai Golkar Pelalawan untuk pilkada tahun 2020 ini menggambarkan adanya perbedaan kepentingan, pandangan dan posisi politik. Tetapi untuk keputusan Golkar yang mengusung kadernya sendiri menunjukkan bahwa partai ini masih menjalankan fungsinya sebagai agen rekrutmen politik.

Jika Adi Sukemi memiliki pandangan bahwa ia yang paling berhak diusung Partai Golkar karena memajukan Golkar di Pelalawan, Nasarudin berpendapat bahwa pengalamannya yang pernah menjabat sebagai anggota DPRD, ketua komisi di DPRD, ketua DPRD, dan bahkan peringkat dua Pileg DPR RI, menjadikannya layak untuk berkontestasi di pilkada. Pada

akhirnya, Nasruddin memilih untuk mengikuti kontestasi pilkada sebagai calon wakil bupati melalui partai politik yang lain.

Dalam pandangan Nasruddin, partai politik adalah kendaraan politik ataupun instrumen untuk menuju kekuasaan, bukan tujuan akhir. Sementara tujuan kekuasaan adalah mewujudkan kemakmuran untuk masyarakat. Keinginan Nasruddin untuk mewujudkan kemakmuran tidak didapatkan melalui Partai Golkar karena tidak dinominasikan sehingga menurutnya ia memiliki hak untuk mencari mandat dari partai politik lain.

Sukemi yang merupakan Ketua Golkar Pelalawan mengungkapkan bahwa Nasarudin meminta izin pamit kepada partai ketika memutuskan untuk mencalonkan diri dari partai lain. Menurut Sukemi, keputusan itu sah karena merupakan hak setiap kader, tetapi ia menyayangkannya karena menurutnya Golkarlah partai yang telah membesarkan Nasarudin sebagai politisi.

Wakil Ketua Bappilu Golkar Riau, Ikhsan, mengatakan bahwa kandidasi calon bupati yang diusung

oleh partainya mengutamakan kader. Indikator berikutnya adalah posisi di struktural partai, dimana posisi Adi Sukemi sebagai Ketua Golkar Pelalawan menjadikannya sebagai kandidat yang diusung oleh partai. Selain itu posisi Sukemi yang juga merupakan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan periode 2019-2024 semakin menguatkan keputusan tersebut. Oleh karena itu, konflik yang bersumber pada kandidasi ini berujung pada penonaktifan Nasarudin sebagai kader Partai Golkar, sesuai dengan aturan internal partai. Hal ini dilakukan agar Nasarudin tidak menggunakan simbol-simbol dan mesin politik yang dimiliki oleh Golkar saat berkampanye. Pilkada Pelalawan 2020 kemudian menghasilkan kekalahan kandidat yang diusung oleh Golkar sebagaimana dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. Hasil Perolehan Suara pada Pilkada Pelalawan Tahun 2020

No	Kandidat	Persentase Suara (%)	Partai Pendukung
1	Abu Mansur Al Matridi-Habibi Hapri	13,28%	Hanura, PAN, PKS
2	Zukri Misran-Nasarudin	40,01%	PDIP, PKB, PPP

3	Husni Tamrin-Tengku Edy Sabli	23,46%	Gerindra, Demokrat, Nasdem
4	Adi Sukemi-Muhammad Rais	24,14%	Golkar

Sumber: Diolah dari data KPU Pelalawan (2020)

Dari tabel di atas terlihat bahwa kandidat yang diusung Golkar hanya menjadi nomor urut kedua dari perolehan suara. Nasarudin yang maju sebagai calon wakil bupati dengan pasangannya Zukri Misranlah yang memenangkan kontestasi, dan didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Persatuan Pembangunan. Berdasarkan data-data di atas, artikel ini beragumen bahwa perpecahan atau tidak solidnya internal Golkar dalam proses kandidasi menggerus perolehan suara mereka yang menjadi terpecah sehingga mengakibatkan kekalahan pada kandidat yang diusung oleh Golkar. Suara Golkar yang dalam beberapa pemilu sebelumnya solid menjadi berpindah sebagian sehingga mengganggu kinerja elektoral Golkar.

Faktor kedua yang berkontribusi pada kekalahan kandidat yang

diusung oleh Golkar adalah tidak adanya koalisi. Sebagaimana yang terlihat pada Tabel 3, dari empat pasangan calon, hanya calon yang diusung oleh Golkar tidak berkoalisi dengan partai lainnya. Masing-masing tiga calon lain diusung oleh koalisi tiga partai politik. Sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini peta kekuatan politik di Pelalawan tersebar di banyak partai.

Tabel 4. Jumlah Kursi Partai-partai Politik pada DPRD Kabupaten Pelalawan 2019-2024

Partai Politik	Jumlah Kursi
Partai Kebangkitan Bangsa	3
Gerakan Indonesia Raya	4
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5
Golongan Karya	9
Partai Keadilan Sejahtera	2
Partai Persatuan Pembangunan	2
Partai Amanat Nasional	5
Hati Nurani Rakyat	2
Demokrat	3
Total	35

Sumber: Diolah dari data KPU Pelalawan (2020)

Berdasarkan komposisi di atas, maka jika dikonversi pada jumlah dukungan pada empat pasangan calon bupati-wakil bupati adalah sebagai berikut: pasangan pertama didukung 9 kursi, pasangan kedua didukung 10 kursi, pasangan ketiga didukung 7 kursi, dan pasangan keempat

didukung oleh 9 kursi. Hal ini menggambarkan bahwa peta kekuatan antarcalon sangat kompetitif, yang juga ditunjukkan dengan rekapitulasi hasil suara yang tidak terlalu jauh (lihat Tabel 3). Pada pelaksanaan pilkada secara langsung, jumlah partai pendukung memang tidak berkorelasi langsung dengan keterpilihan kandidat, mengingat suara rakyatlah yang menentukan hasil. Tetapi, peta persebaran kekuatan politik masih bisa mempengaruhi mengingat karakter politik di Indonesia yang sangat dipengaruhi oleh karakter patronase.

Kebijakan Golkar memberikan keleluasaan kepada pasangan kandidat yang diusung di pilkada untuk mencari partai politik lain dalam berkoalisi (wawancara dengan Ikhsan). Adi Sukemi mengatakan bahwa tidak berkoalisinya Golkar merupakan strategi pemenangan untuk memberi ruang bagi partai-partai politik lain mengajukan kandidat sehingga tercipta lebih dari dua pasangan calon pada Pilkada Pelalawan tahun 2020. Upaya untuk berkoalisi dilakukan dengan partai lain seperti PKS, tetapi Golkar tidak menyanggupi persyaratan calon wakil

bupati harus berasal dari kader PKS tersebut (Sugiono 2020). Selain itu, Golkar juga sudah memenuhi syarat untuk mengusung pasangan calon sendiri pada pilkada karena telah mengantongi 9 kursi atau lebih dari 30% di DPRD (wawancara dengan Baharuddin).

Berdasarkan data-data tersebut, artikel ini berargumen bahwa tidak berkoalisinya Golkar dengan partai lain juga berkontribusi terhadap kekalahan kandidat yang diusung Golkar. Kekuatan Golkar Pelalawan yang sudah tergerus oleh majunya dua kader pada kontestasi yang bersamaan membuat kinerja elektoral makin terganggu karena tidak adanya dukungan dari partai politik lain, untuk menambah dan memperluas dukungan.

Faktor ketiga yang turut mengakibatkan kalahnya kandidat yang diusung Golkar adalah faktor figur. Dalam sebuah survei sebenarnya Zukri Misran-Nasarudin mempunyai elektabilitas yang lebih tinggi dibandingkan Sukemi. Tetapi, status Sukemi yang menjadi Ketua Golkar Pelalawan sekaligus anak dari Harris, Bupati Pelalawan di dua periode

sebelumnya, lebih mempengaruhi keputusan Golkar untuk menominasikan Sukemi. Sementara itu menurut sejumlah kader Golkar Pelalawan, Nasarudin juga lebih cocok ketimbang Sukemi sehingga memilih mendukung Nasarudin yang diusung oleh PDIP, PPP, dan PKB.

Pengalaman ini mengkonfirmasi bahwa faktor figur lebih berpengaruh ketimbang partai politik dalam dinamika pilkada di Indonesia, dimana dalam konteks ini Zukri-Nasarudin lebih populer dan dipilih oleh pemilih di Pelalawan meskipun tidak diusung oleh Golkar, yang mendominasi berbagai pemilu di Pelalawan. Akhirnya, faktor figur ini menjadi faktor terakhir yang berkontribusi terhadap kekalahan kandidat yang diusung Golkar pada Pilkada Pelalawan tahun 2020.

SIMPULAN

Artikel ini menyimpulkan bahwa kekalahan kandidat yang diusung oleh Partai Golkar pada Pilkada Pelalawan tahun 2020 disebabkan oleh setidaknya tiga faktor, yaitu adanya konflik internal partai, tidak adanya koalisi, dan faktor figur. Artikel ini

mengkonfirmasi teori-teori yang berkaitan dengan faksionalisasi, partai politik dan dinamika pilkada selama ini. Faksionalisasi Golkar pada Pilkada Pelalawan berdampak pada terganggunya kinerja elektoral partai tersebut. Sementara itu, pilihan Golkar untuk tidak berkoalisi dan menominasikan kadernya meski tidak memiliki popularitas dan elektabilitas tertinggi juga membuktikan bahwa faktor figur lebih berpengaruh signifikan dalam kontestasi pilkada, dan pada saat bersamaan peran partai politik relatif minim.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A. dan Sultan, M.I., (2011), Analisis Kekalahan Calon Partai Golkar dalam Pilkada Kabupaten Polewali Mandar Periode 2008-2013: Studi Strategi Kampanye Politik. *Jurnal Komunikasi KAREBA*, 1 (1): 26-42.
- Aspinall, E. dan Berenschot, B. (2019). *Democracy for Sale: Pemilu, Klientelisme, dan Negara di Indonesia*. Jakarta: Obor.
- Creswell, J. W. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. (terj). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haris, S. Faksionalisasi dan Konflik Internal Partai, dalam: Budiatri, A (Ed). (2018). *Faksi dan Konflik Internal Partai Politik di Indonesia Era Reformasi*. Jakarta: Obor.
- Hendrawan, A., Berenschot, W., dan Aspinall, E. (2021), Parties as pay-off seekers: pre-electoral coalitions in a patronage democracy. *Electoral Studies*, 69:
- Heywood, A. (2002). *Politics 2nd Edition*. New York: Palgrave.
- Makhasin, L., (2016), Orientasi Ideologi dan Pragmatisme Politik Model Pembentukan Koalisi dalam Pilkada Serentak di Jawa Tengah 2015. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 19 (3): 234-250.
- Muhammad, S. (2021), Perpecahan dan Soliditas Elite Partai Golkar pada Pemenangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2015, *JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 2 (2): 1-10.
- Mujani, S., Liddle, R.W., dan Ambardi, K., (2019). *Kaum Demokrat Kritis: Analisis Perilaku Pemilih Indonesia sejak Demokratisasi*. Jakarta: KPG.
- Nurhasim, N. Dampak Faksi dan Konflik Internal Partai, dalam: Budiatri, A (Ed). (2018). *Faksi dan Konflik Internal Partai Politik di Indonesia Era Reformasi*. Jakarta: Obor.
- Nurjiyanto. (2018). *Faktor Figur Menentukan di Pilkada, di Pilpres Belum Tentu*. Diakses dari <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/168703/faktor-figur-menentukan-di-pilkada-di-pilpres-belum-tentu>.
- Pratama, R.Y., Bandiyah, dan Erviantono, T. (2016). Kekalahan PDIP dalam Pemilu Pilkada Kabupaten Klungkung Tahun 2013. *Politika Udayana*.
- Setiawan, K.M.P., dan Tomsa, D. (2022). *Politics in Contemporary Indonesia: Institutional Change, Policy*

Challenges, and Democratic Decline.
New York: Routledge.

Sugiono, F. (2020). *PKS Syaratkan Kadernya Jadi Wakil untuk Berkoalisi Pilkada Pelalawan.* Diakses dari <https://www.cakaplah.com/berita/baca/54177/2020/05/27/pks-syaratkan-kadernya-jadi-wakil-untuk-berkoalisi-pilkada-pelalawan/#sthash.9pr72SMp.dpbs>